

## ABSTRACT

The emerging of regional autonomy policy has authorized Regional Government to develop its own laws which include regional regulations, regent regulations and regent decision. This legal drafting process is strictly based on standardized format from higher regulations and mostly supervised by Division of Law in Secretary Office of Regional Government which at the same time conduct its recording and facilitating information system. Recent existing manual recording and supervision spend a lot of time and paper.

This design of information system management is one alternative solution to solve such problems. This research contains business process, Unified Modelling Language Diagram, database layout and prototype of the system. The recording of legal drafting process is covered in the prototype and is easily accessed for all targeted parties.

The use of information system management are expected to accelerate the process of legal drafting process and reduce the use of paper. In addition, with this prototype is hoped that the information about the process of legal drafting could get easier, faster and realtime.

**Key Word** : Unified Modeling Language (UML), legal drafting, prototyping, information system

## INTISARI

Bergulirnya kebijakan mengenai otonomi daerah memberikan kewenangan bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun produk hukum daerah meliputi peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan keputusan kepala daerah. Penyusunan produk hukum daerah harus dilakukan sesuai dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang ditetapkan undang-undang sehingga perlu dilakukan supervisi oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota. Pencatatan setiap proses penyusunan produk hukum daerah juga dilakukan oleh Bagian Hukum dalam rangka menyediakan informasi terkait penyusunan produk hukum kepada para pemangku kepentingan. Pencatatan secara manual berakibat pada lambatnya penyediaan informasi terkait penyusunan produk hukum daerah. Selain itu, supervisi berkas rancangan produk hukum mengakibatkan pemborosan penggunaan kertas.

Pembuatan sistem informasi manajemen administrasi penyusunan produk hukum daerah merupakan salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini menjelaskan proses bisnis, diagram *Unified Modeling Language (UML)*, rancangan basis data dan prototipe dari sistem informasi manajemen administrasi penyusunan produk hukum daerah. Sistem informasi tersebut mencatat setiap proses penyusunan produk hukum daerah yang dapat diakses oleh semua instansi sehingga setiap instansi dapat melakukan pengecekan kemajuan proses penyusunan produk hukum.

Pengujian prototipe SIM Administrasi Penyusunan Produk Hukum Daerah dilakukan dengan metode FGD melalui simulasi dengan menjalankan semua fungsi inti yang ada dalam sistem kepada calon pengguna. Hasil pengujian dinyatakan bahwa sistem sudah berhasil menjalankan fungsi-fungsi inti dari proses bisnis penyusunan peraturan daerah serta usecase yang telah dirancang. Sistem yang dibangun membantu dalam penyelesaian tugas dan memberikan informasi kemajuan proses penyusunan produk hukum. Dengan demikian SKPD dapat memperoleh informasi mengenai proses penyusunan produk hukum secara cepat, mudah dan *realtime*.

**Kata Kunci :** *Unified Modeling Language (UML)*, produk hukum, *prototyping*, sistem informasi